

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsekuensi Hukum dalam pemberian Perlindungan Hukum untuk Penggugat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menerima Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG yaitu:
 - a. Penguatan Prinsip Legalitas dan Prosedur Setiap sanksi disiplin, termasuk pemberhentian PNS, harus sesuai hukum dan prosedur yang benar; pemberhentian tanpa klarifikasi melanggar asas kepastian hukum.
 - b. Hak Penggugat untuk Perlindungan Hukum Gugatan yang diterima PTUN membuktikan bahwa Penggugat berhak secara hukum untuk menolak keputusan yang merugikan hak-haknya.
 - c. Konsekuensi bagi Pemerintah Daerah Pemerintah wajib membatalkan keputusan yang cacat hukum dan memulihkan hak-hak Penggugat, termasuk status, gaji, dan nama baik.
 - d. Dampak terhadap Tata Kelola Kepegawaian Putusan ini menjadi pengingat agar pejabat kepegawaian bersikap objektif, transparan, dan adil dalam menjatuhkan sanksi. Perlindungan Hak Konstitusional Penggugat
2. Dampak dari Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 15/6/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a. Adanya tekanan Psikologis dan Sosial yang dialami Penggugat
 - b. Penggugat Kehilangan Tunjangan dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil

- c. Adanya Ketidakpastian Hukum Terhadap Penggugat
- d. Penggugat Masih Memiliki Beban Tanggungan Keluarga

D. Saran

1. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan kepegawaian, terutama yang berkaitan dengan pemberhentian PNS. Setiap keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip keadilan serta prosedur yang benar.
2. Agar proses evaluasi terhadap PNS oleh Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dilakukan secara objektif, proporsional, dan mengedepankan asas kehati-hatian sebelum menjatuhkan sanksi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Elidar Sari dan Hadi Iskandar, 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. BieNa Edukasi, Aceh
- Manullang, M, 1979, *Managemen Personalia* , Aksara Baru, Jakarta.
- Mardalis, 2010, *Metode Pendekatan Suatu pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum LPPM Universitas Bung Hatta*, Padang
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rozali Abdullah, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- S. F. Marbun, 2003. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Sari Elidar, M. H. S.H dan Hadi Iskandar, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Biena Edukasi, Lhokseumawe
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sri hartini, Kadarsih Setiadjeng dan Sudrajat Tedi. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- W,J,S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- W. Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Atmajaya Yogyakarta Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

C. Sumber Lain

- Alfadhil, 2021, Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. *Jurnal Sosial-Politika*, Volume 2(2).
- Candra, 2021, Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Junaedi, 2022, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*.
- Maulana, 2019. Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1).
- Patabo, 2021, Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4).
- Runtunuwu, 2022, Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 10(5).
- SALEH, Penanggulangan Tindak Pidana Larangan Peredaran Minuman Berakohol Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 dan Upaya Pembaharuannya ke Depan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4).
- Suprayetno, Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4).
- Wahyono, Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia*, 20(2).
- Akbar, W. S., & Frinaldi, A., 2024. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akutansi (JUMEA)*, Vol. 1, No. 2
- Erwin, R., Angelia, R. R. O., & Desmon, A. 2024. Transformasi Manajemen ASN ,Vol. 6, No. 3
- Ichsan, R. N., Surianta, E., & Nasution, L. 2020. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer (Ajendam)-I Bukitbarisan Medan. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 2
- Jaelani, A. K., 2020, Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan*

Kajian Hukum, Vol. 18, No. 2.

Luhukay, R. S., 2024, Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1

Nahak, A. 2023, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3

Ningtyas, V. A. A., 2021, Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1

Rivaldy, M., 2023, Tinjauan Yuridis Kode Etik Aparatur Sipil Negara ,Manado,*Lex Administratum*, Vol. 12, No. 1